



KANTOR STAF PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Mengapa harus #jadiopen?

*Gagasan dan praktik keterbukaan pemerintah:
Sebuah catatan keterlibatan*

Yanuar Nugroho

- Deputi Kepala Staf Kepresidenan
Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis, Kantor Staf Presiden RI
 - *National Focal Point, Open Government Partnership, Indonesia*
yanuar.nugroho@ksp.go.id ; @yanuarnugroho
- Jakarta, 8 Agustus 2018



METODE KO-KREASI OPEN GOVERNMENT



Ko-kreasi merupakan proses bersama antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil (CSOs) dalam :



Melakukan diseminasi Informasi kepada para *stakeholder*



Menciptakan ruang dan *platform* untuk berdialog dan ber-ko-kreasi



Menjalankan proses dan pembuatan keputusan secara konsensus



NILAI NILAI OPEN GOVERNMENT

Inovasi

Partisipasi

Akuntabilitas

Transparansi



INOVASI

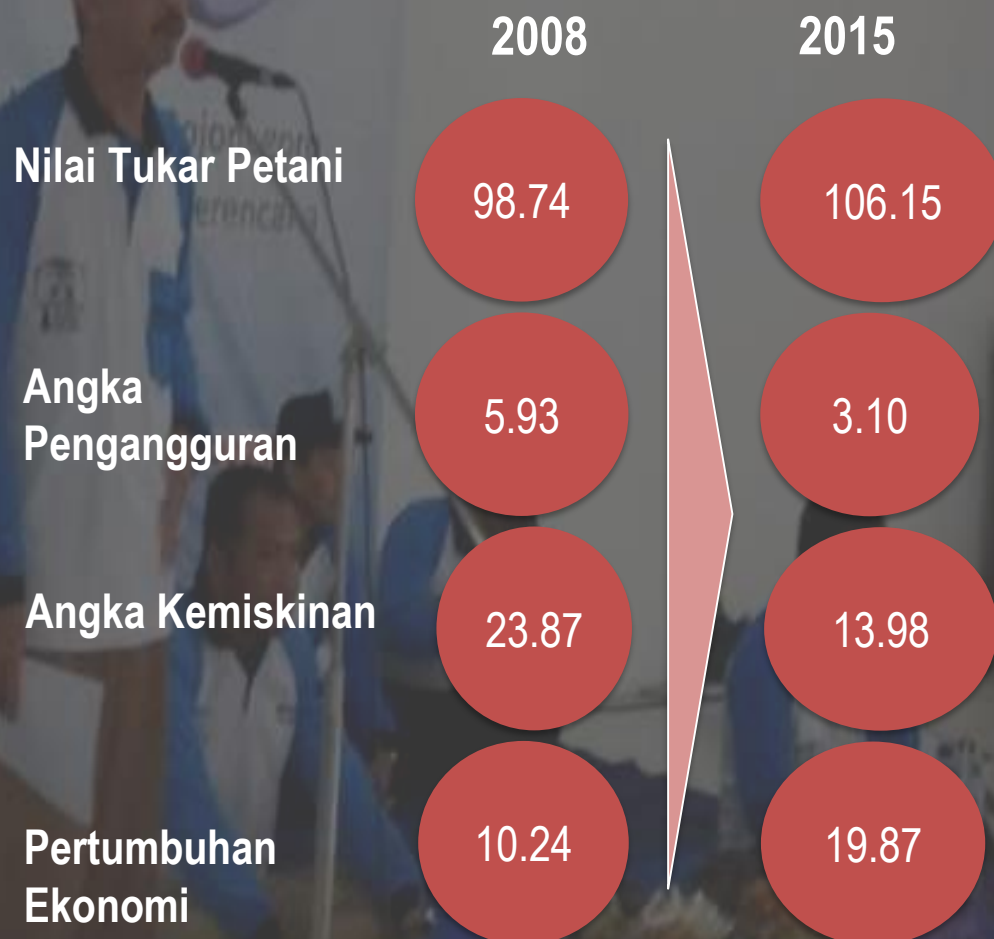




KOTA PINTAR BOJONEGORO

Kota Pintar Bojonegoro merupakan salah satu inovasi hasil dari inisiatif *Open Government* dengan mengintegrasikan partisipasi masyarakat pada berbagai bidang.

Indikator Keberhasilan





SATU DATA INDONESIA

*“Inisiatif Satu Data merupakan upaya untuk **mengakurasi**, **membuka** dan **menggunakan** data pemerintah”*



Meningkatkan
kualitas
pengumpulan
data



Meningkatkan
aksesibilitas
dengan integrasi
portal satu data
(data.go.id)



100% valid

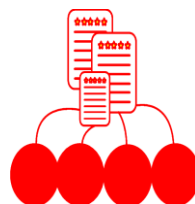
Meningkatkan
kualitas analisis
data

Manfaat



Untuk pemerintah

Penggunaan data untuk
pengambilan kebijakan



Untuk masyarakat

Penggunaan data untuk
kebutuhan masyarakat



PARTISIPASI





PARTISIPASI

LAPOR!

PORTAL PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

LAPOR! atau **Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat** (LAPOR!) adalah sarana **aspirasi dan pengaduan** berbasis multi-platform, termasuk media sosial, yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas.

TERINTEGRASI

- “No wrong door policy”
- 100 institusi pemerintah
- 48 Pemda
- 90 BUMN
- 130 Kedutaan RI

AKSES MUDAH

- Multikanal
- Mekanisme interaktif
- Fitur untuk whistleblowers

TRANSPARAN

- Proses yg akuntabel
- Sistem monitoring yg partisipatif
- Statistik yang terbuka



PARTISIPASI: CERITA LAPOR!

CERITA LAPOR PERMASALAHAN STOK E-KTP TANGERANG

Tindak lanjut permasalahan Stok KTP di Tangerang yang diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja. Melalui LAPOR! permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat oleh pihak yang terkait dengan aduan permasalahan.

Laporan masuk (27/8/2016)

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT ☐ Ingat Saya ☐ Lupa Password

Stok e-KTP Habis

LAPORAN: Yth. Kementerian Dalam Negeri,	TRACKING ID: 1567626
Kepada Yth	USER: Utomo Budidarmo
Kementerian Dalam Negeri	PLATFORM: Web
di	TANGGAL: 27 August 2016 10:53:24
	KATEGORI: Administrasi

Tindaklanjut Laporan (29/8/2016)

★★★★☆(3.0/2)

 **Kementerian Dalam Negeri**

Yth Saudara Pelapor. Terkait pengaduan Saudara, perlu disampaikan bahwa saat ini blangko sudah tersedia dan petugas yang berwenang akan mengambil di Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Demikian terima kasih.

Salam

29 August 2016 11:15:19

Feedback masyarakat

(29/8/2016)

★★★★★(5.0/1)



Utomo Budidarmo

Alhamdulillah akhirnya jadi juga. Terimakasih Lapor.go.id

23 September 2016 21:17:53

PARTISIPASI: CERITA LAPOR!



CERITA LAPOR PERMASALAHAN PUNGUTAN LIAR DESA PESAJIAN

Hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap tindakan pungutan liar pengurusan E-KTP di Desa Pesajian. Laporan tersebut terintegrasi mulai dari Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kecamatan Batang Peranap

REPORT

Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Inhu (Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu)

menindaklanjuti laporan pemungutan pembuatan e KTP di Desa Pesajian kepada yang bersangkutan di lakukan klarifikasi bahwa tidak ada pungutan dalam pembuatan e KTP tersebut

Lampiran :



26 July 2018 16:25:21

TRANSPARANSI





TRANSPARANSI PENGUNAAN DANA DESA

Menggunakan media yang atraktif dalam mempermudah masyarakat desa mengetahui dan mengawal penggunaan dana desa. Hal ini termasuk dalam upaya untuk mencegah korupsi.

TRANSPARANSI: KETERBUKAAN KONTRAK PENGADAAN



BOJONEGORO OPEN SYSTEM



BERANDA



SATUAN KERJA



PENYEDIA



USING DATA

74

Dinas



% charge



2995

Total Kontrak Ditandatangani



% charge



Rp. 597.975.106.613

Total Anggaran (Rp)



% charge



Daftar Kontrak Terbuka

Show 10 entries



RP.

METODE:

SATUAN KERJA

KODE PEMILIHAN PENYEDIA: ODCID-955

PEMENANG

BOJONEGORO OPEN SYSTEM

Pemda Bojonegoro bersama *Bojonegoro Institute* membangun aplikasi *Bojonegoro Open System* (BOS). BOS mendorong transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa bersama masyarakat.



AKUNTABILITAS





DESANITA

DesaNita merupakan salah satu bentuk inisiatif Open Government dalam nilai akuntabilitas. Dalam program DesaNita, masyarakat ikut terlibat dalam mengawal dana untuk sektor kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah.



AKUNTABILITAS DANA PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

Pembangunan bidang pendidikan melalui pemberdayaan masyarakat untuk melakukan rehabilitasi gedung sekolah rusak dan tidak layak pakai. Ini hasil sinergi antara tiga pilar kekuatan di bidang pendidikan, yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.



INISIATIF KETERBUKAAN



ADAPTASI INISIATIF DAN PRINSIP KETERBUKAAN

KOMITMEN INTERNASIONAL



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

KOMITMEN NASIONAL



- *Tujuan: Terlibat dalam agenda pembangunan global di 2030*
- *Negara yang berpartisipasi: 193*



- *Tujuan: Transparansi sektor ekstraktif*
- *Negara yang berpartisipasi: 51*
- *Tujuan: Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pada tata kelola pemerintahan*
- *Negara yang berpartisipasi: 75*



NDC

- *Tujuan: Mencegah dampak lingkungan dan menstabilkan iklim global*
- *Negara yang berpartisipasi: 195*

Perpres 54/2018
tentang Strategi
Nasional Pencegahan
Korupsi

Fokus:
Komitmen untuk membuka data kepemilikan manfaat perusahaan (BO)

Perpres 9/2016 tentang
Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta

Tujuan:
Komitmen untuk mengintegrasikan data spasial



SATU DATA
INDONESIA

Tujuan:
Komitmen untuk mengintegrasikan data-data pemerintah



KANTOR STAF PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Terima kasih

Yanuar Nugroho

- Deputi Kepala Staf Kepresidenan
Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis, Kantor Staf Presiden RI
- *National Focal Point, Open Government Partnership, Indonesia*
yanuar.nugroho@ksp.go.id ; @yanuarnugroho

Jakarta, 8 Agustus 2018